

Perbandingan Penerapan E-Government Negara Indonesia Dan Jepang

Dea Rahma Sabrina¹, Timbul Dompok², Etika Khairina³

Administrasi Negara, Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepri

pb231010020@upbatam.ac.id

Abstract

This study intends to investigate the similarities and differences between the implementation of e-Government in Indonesia and Japan, with the goal of identifying the most significant differences in approaches, progress, and challenges that both countries are currently facing. It is a qualitative research method that is used, and the data collection process is carried out through the study of literature from a number of journals and articles that are related to the topic. E-Government systems have been actively developed by countries such as Indonesia and Japan in response to globalization and advancements in information technology. The goal of these systems is to improve the efficiency, accessibility, and transparency of governance. Electronic government is one of the technological advancements that the government has adopted in order to facilitate services and as a tool for delivering information to the public through the internet or social media that is, of course, related to issues that are being addressed by the government. The information and communication technology (ICT) infrastructure in Japan is extremely advanced, with a high percentage of people using smartphones and extensive internet connectivity. In the meantime, Indonesia continues to struggle with increasing internet accessibility and the penetration of information and communication technology in rural areas.

Keywords e-Government; Indonesia; Jepang

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki persamaan dan perbedaan antara implementasi e-Government di Indonesia dan Jepang, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan yang paling signifikan dalam pendekatan, kemajuan, dan tantangan yang saat ini dihadapi oleh kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari sejumlah jurnal dan artikel yang terkait dengan topik tersebut. Sistem E-Government telah dikembangkan secara aktif oleh negara-negara seperti Indonesia dan Jepang sebagai respon terhadap globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pemerintahan. Electronic government merupakan salah satu kemajuan teknologi yang diadopsi oleh pemerintah dalam rangka mempermudah pelayanan dan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui internet atau media sosial yang tentunya terkait dengan isu-isu yang sedang ditangani oleh pemerintah. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Jepang sudah sangat maju, dengan persentase yang tinggi dari masyarakat yang menggunakan ponsel pintar dan konektivitas internet yang luas. Sementara itu, Indonesia masih terus berjuang untuk meningkatkan aksesibilitas internet dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di daerah pedesaan.

Kata Kunci Pemerintahan Elektronik; Indonesia; Jepang

1. Pendahuluan

Teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang kita saksikan di era modern. Sejak Tahun 1990-an beberapa negara di dunia mulai menggunakan sistem pemerintahan menggunakan elektronik. Tercatat negara-negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang, Australia dan

Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak teknologi pada manusia dan perubahan yang dihasilkannya sangat luas dan beragam, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, sehingga melalui teknologi orang telah mengubah dunia. Internet membantu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Itulah mengapa saat ini sangat mudah untuk

menjangkau informasi, ringkas, dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi kini mulai diterapkan di berbagai bidang, termasuk di bidang pemerintahan.

Sekarang adalah mungkin untuk mengakses layanan publik, pemerintah, dan hubungan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital. Tidak lagi cukup bagi hubungan antara masyarakat dan pemerintah untuk terbatas pada jam kerja, kehadiran fisik, dan saluran komunikasi tertutup. Kehadiran teknologi informasi telah menciptakan kesenjangan yang signifikan antara mereka yang mengelola layanan dan mereka yang menerima mereka. Dalam kapasitas mereka sebagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan pemerintah, komunitas menjadi semakin kompetitif dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Bidang teknologi informasi telah berkembang menjadi fasilitas publik, yang telah memungkinkan pembentukan hubungan yang lebih luas dalam bidang layanan pemerintah. Ini tidak lagi hanya fasilitas pribadi. (Surya Budiman, n.d.). Dengan munculnya globalisasi dan kemajuan dalam teknologi informasi, Indonesia dan Jepang telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan sistem pemerintah elektronik dengan tujuan meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan transparansi pemeliharaan pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti *Wide Area Networks, Internet, dan Mobile Computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mengubah hubungan mereka dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pemangku kepentingan disebut e-government. (Ramadhan et al., 2019). Implementasi e-government melibatkan penggunaan Internet untuk melakukan operasi pemerintah, serta untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dengan cara yang berfokus pada layanan publik. Semakin banyak, kegiatan ini didorong untuk terus membuat perubahan sebagai hasil dari kemajuan berkelanjutan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan cepat implementasi atau implementasi e-government di Indonesia dibandingkan dengan periode implementasi awal. Salah satu mekanisme yang paling efektif untuk interaksi antara pemerintah dan publik, sektor swasta, atau pemerintah itu sendiri adalah penggunaan pemerintah elektronik. Melalui implementasi e-government, tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan publik.

Di sejumlah negara di seluruh dunia, implementasi pemerintah elektronik telah muncul sebagai prioritas umum bagi

pemerintah. Dengan menggunakan potensi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari dan dengan memanfaatkan potensi sistem ICT, masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dalam kerangka kerja, nilai-nilai, komunitas, dan metode melakukan bisnis. Salah satu aspek yang paling penting dari era kita adalah teknologi informasi dan komunikasi. Setiap penemuan baru membawa perubahan tertentu dalam hidup kita. Implementasi e-government sedang berlangsung di seluruh dunia dengan tujuan mengurangi biaya, meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat umum, dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tingkat global, regional, dan lokal. Ada 192 perwakilan PBB, dan 179 dari mereka telah menyatakan bahwa implementasi sistem e-government telah selesai. E-government telah terdaftar sebagai salah satu prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Selain menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi biaya layanan publik, e-government lebih dari sekedar mekanisme. (Utama, 2020).

Di sejumlah wilayah di seluruh dunia, e-government, juga dikenal sebagai e-government, telah muncul sebagai alat penting dalam proses transformasi administrasi publik. Terutama dalam hal kehidupan orang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah memiliki dampak yang signifikan. Pada setiap saat, pemerintah elektronik memastikan bahwa semua lembaga negara, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki akses terbaik ke informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Upaya oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat umum sedang dilakukan melalui implementasi teknologi dalam aplikasi pemerintah elektronik. Sebuah layanan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membawa rasa kepuasan bagi orang-orang yang menggunakannya. Selain itu, penggunaan e-government seharusnya membantu dalam implementasi layanan publik dengan cara yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien dalam hal waktu, anggaran, dan implementasi hubungan sederhana.

E-government telah diimplementasikan dalam berbagai cara yang berbeda oleh sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Jepang, antara lain. Tidak hanya implementasi e-government dilakukan sebagai teknologi, tetapi juga digunakan sebagai kebijakan dan aturan yang baik di setiap negara di seluruh dunia. Ada sejumlah tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh perjalanan pemerintah elektronik dalam konteks

Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa ada kemajuan yang telah dibuat, pemerintah elektronik kami masih tertinggal dan kehilangan tanah dengan kecepatan yang cepat dibandingkan dengan rencana dan tujuan awal, terutama jika dibandingkan dengan kemajuan di wilayah ini. (Rambe Analisis Kebijakan Ahli Pertama & Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022).

Keberanian penyedia layanan publik yang dimiliki pemerintah harus didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana banyak kritik diarahkan ke arah peningkatan kualitas penyediaan layanan publik. Di masa lalu, lembaga pemerintah telah secara konsisten menunjukkan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan publik. Manajemen KTP, izin mengemudi (SIM), izin bangunan (IMB), kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang mudah dan berkualitas, layanan kesehatan yang tidak dapat diakses oleh mayoritas orang, dan sebagainya hanyalah beberapa contoh dari jenis-jenis contoh layanan publik yang rumit yang disediakan pemerintah. (Endang, n.d.).

Akibatnya, tingkat persaingan di agen penyedia layanan publik meningkat, yang mengakibatkan proses yang lebih lama dan lebih mahal. Indonesia, negara besar dalam proses pengembangan, harus mengakui bahwa ada persyaratan yang tak terbantahkan untuk layanan publik yang kompeten dan berkualitas tinggi.

Di era informasi ini, layanan publik menghadapi banyak tantangan. Tema di tangan adalah hubungan yang ada antara bangsa dan pasar, serta antara negara dan warganya dan pasar dengan rakyatnya. Secara historis, negara telah berusaha untuk menetapkan dirinya sebagai partai yang paling berkuasa di bidang pelayanan publik. Terlepas dari kondisi layanan publik yang saat ini tersedia, pasar dan warga tidak mau menerimanya. Komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan tidak ramah dan cenderung lemah atau tidak efektif, yang merupakan salah satu alasan mengapa sejumlah besar warga tidak puas dengan layanan publik yang mendukung kelompok-kelompok tertentu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan logika, kondisi layanan publik yang diberikan telah menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi dan manajemen layanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua warga dapat memanfaatkan layanan publik yang tersedia.

Penulis bermaksud membuat perbandingan e-government dari kedua negara ini dalam sebuah makalah ilmiah yang akan berjudul Perbandingan aplikasi e-governance

antara negara-negara Indonesia dan Jepang. Perbandingan ini akan didasarkan pada implementasi e-government di dua negara yang disebutkan di atas.

Menguraikan latar belakang penelitian, batasan, dan tujuan penelitian. Untuk menghindari plagiarisme, gunakan teknik parafrasa.

Tabel 1. United Nations (UN) e-Government Survey 2020



(Sumber: UN e-Government Survey)

Grafik berikut menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-88 dalam hal pengembangan dan implementasi e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menurut e-Government Survey 2020 PBB. Peringkat 2020, yang diumumkan pada bulan Juli, mengungkapkan kenaikan 19 tempat dari 2018 dan 2016, ketika mereka berada di peringkat 107 dan 116 masing-masing.

2. Kajian Literatur

Sering disingkat sebagai "G2C", (*Government to Citizen*) mengacu pada penggunaan aplikasi komputer dan berbasis Internet oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan melayani warga negara mereka. G2G (*Government to Government*) mengacu pada kemitraan antara pemerintah federal, negara bagian, dan regional, sedangkan G2B (*Government to Business*) menggambarkan interaksi antara pemerintah federasi, negeri, dan lokal.

"E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government." Pada dasarnya, e-government mengacu pada apa pun yang membuat penggunaan ICT yang lebih baik untuk meningkatkan aksesibilitas,

efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah.

Semua definisi yang disebutkan di atas berasal dari tempat yang sama: gagasan bahwa e-government adalah penggunaan IT oleh pemerintah untuk mempromosikan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan dalam *good governance* (yaitu, lembaga di masyarakat dan bisnis) untuk memberikan layanan lebih baik dan lebih efisien. Dalam banyak kasus, administrasi elektronik telah menggantikan pemerintah elektronik. Kedua topik ini terkait dengan penggunaan ICT dalam administrasi publik. Sebelum menerapkan teknologi di lembaga bisnis menggunakan layanan internet, *Electronic Administration* (E-Adm) diperluas dengan merangkul *electronic business*, *electronic commerce*, dan *electronic market*. (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

E-government, yang mengintegrasikan teknologi ke dalam layanan pemerintah, sekarang ada di mana-mana. Proses pemerintah yang panjang, membosankan, mahal, dan rentan terhadap korupsi dapat ditingkatkan dengan bantuan sistem e-pemerintah yang dapat diandalkan. (Dwiyanto Nurlukman, n.d.).

Manajemen dan pengembangan pemerintah menyebabkan penyalahgunaan aparat pemerintah, menciptakan pemerintahan yang (*abuse of power*) aparat pemerintah; sentralistik; *top-down*; *self-oriented*; monopolistik; tidak efektif, dan tidak efisien yang kurang sensitif terhadap aspirasi publik dan lebih cenderung mempromosikan praktik korup, konspiratif, dan nepotistik (KKN). Sebuah pola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) muncul dari variabel ini sebagai pola interaksi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Secara umum, rakyat tidak mempercayai pemerintah. Ini adalah jenis masyarakat yang Barzelay (1982) menggambarkan dalam bukunya "*Break Through Bureaucracy*" sebagai yang sakit dan lelah berurusan dengan birokrasi pemerintah yang lambat dan tidak menyenangkan. Di negara-negara berkembang, di mana birokrasi korup dan kurangnya dukungan bagi orang-orang yang seharusnya mereka layani berjalan dalam sektor publik, ini terutama berlaku dalam praktik sehari-hari. Mengingat bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan publik dan pemerintah dapat ditangani dengan cara formalistis, birokrasi juga dianggap sebagai ketat dan formalistis. Ada harapan baru untuk birokrasi dunia berkembang dalam hal efisiensi, produktivitas, akses publik ke informasi birokratik, dan jaminan, keamanan, dan kenyamanan yang datang dengan hidup dalam

ekonomi dan masyarakat yang didorong oleh inovasi teknologi.

Salah satu alasan pemerintah mendapatkan validasi, menurut Osborne dan Gaebler (1992), adalah kelemahan manajemen. Tindakan pemerintah, bukan tindakan itu sendiri, adalah sumber masalah. Kita melihat kehancuran birokrasi jika kita tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki masalah ini. Berdasarkan gagasan bahwa "pemerintah yang paling sedikit adalah pemerintah yang terbaik," Osborne dan Plastrik (1996) mendorong pengurangan birokrasi yang lebih efisien dan efektif (*the best government judges are the best governments*). Kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan kepada mereka oleh posisi masing-masing dalam sistem layanan sosial, termasuk mengelola dana dan memberikan bantuan teknis dengan setiap proses pengembangan sosial.

Namun, internet juga memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan inisiatif e-pemerintah. Sistem e-pemerintah sangat bergantung pada teknologi informasi (IT). Ketika datang ke layanan e-pemerintah, internet adalah tulang belakang. Contoh implementasi e-government dalam aksi adalah peluncuran situs web oleh pemerintah setempat di Indonesia. Situs web adalah portal online yang memfasilitasi layanan pemerintah elektronik. Infrastruktur yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pengguna portal e-government sangat penting, karena portal ini sering sangat interaktif dan tunduk pada pembaruan sering. Solusi ideal untuk setiap pemeliharaan pemerintah menuju pemerintahan yang baik diharapkan menjadi perkembangan yang semakin cepat. Tingkat kesiapan perusahaan adalah faktor lain yang dapat menyebabkan masalah. Orang-orang tidak sepenuhnya siap untuk menggunakan IT mutakhir hanya karena kualitasnya rendah.

Masalah yang terjadi pada pemerintah Indonesia adalah bahwa e-government masih belum berhasil dalam mengimplementasikan layanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan dan pengembangan implementasi e-government tentunya bukan tanpa hambatan. Hambatan yang terjadi adalah stagnasi dalam pembangunan, pemutakhiran data yang tidak memadai, dan pengelolaan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah. Perubahan signifikan yang terjadi sebelum ada e-government dan sesudah ada e-government tidak akan terlihat. Dukungan TI internal menjadi kendala yang cukup besar jika penggunaan teknologi informasi tidak sebanding dengan daya dukung perangkat

yang digunakan dalam penerapan e-government (Ayu & Aryanti, n.d.).

E-government, administrasi, birokrasi, dan ICT, telah diperkaya oleh IT dan meningkatkan kehidupan banyak orang. Hampir semua Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) negara maju dianggap sebagai bahan baku e-government yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada orang atau perusahaan dan merasionalisasi organisasi internal perangkat administratif. Penerapan IT, khususnya internet, telah membuat distribusi informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, nyaman, dan murah tanpa ada kendala jarak atau waktu. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia, Internet sedang diperkenalkan, termasuk sektor pemerintah.

Pada saat yang sama, Jepang memiliki sistem pemerintah elektronik yang sangat baik. Mengapa ya? Karena, seperti semua negara maju, Jepang memiliki sistem pemerintahan yang maju dan dengan demikian merupakan salah satu negara Asia yang dianggap sebagai salah satu yang paling maju di dunia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang jauh lebih maju, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menurut data terbaru dari Speedtest Global Index, kecepatan internet rata-rata di Jepang adalah 47,8 Mbps. Dibandingkan dengan kecepatan internet rata-rata di dunia, ini adalah sekitar 170 persen lebih cepat

Ada tiga era yang berbeda dalam sistem administrasi Jepang, seperti yang dijelaskan oleh Berman, Moon, dan Choi (dalam Abdul 2020), secara historis dipertimbangkan: birokrasi pra-modern, pemerintahan Jepang sebelum perang, dan pemerintah pasca-perang Jepang. Tokugawa Shogunate, sistem yang terdesentralisasi dan sangat feodal, memimpin cabang eksekutif dan pemerintahan selama era birokrasi pra-moderasi. Selain itu, cabang administrasi dan eksekutif negara Jepang sangat berharga. 1), ada nilai legalitas, atau setchi ho, yang mengacu pada prinsip-prinsip sistem hukum yang muncul hanya ketika sektor swasta negara / USN diizinkan oleh hukum. Otorisasi ini juga menyiratkan bahwa sektor swasta negara/USN harus menegakkan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan hukum ASN, dan mematuinya. 2) Moderasi (artinya, keseimbangan antara politisi dan birokrat; masing-masing harus bertindak secara bertanggung jawab, tetapi tidak egois; dan setiap orang harus siap untuk meninggalkan ego sektoral mereka sendiri untuk melayani orang-orang). 3), (menurut sumber Jepang yang paling berwenang), hierarki adalah faktor penting dalam keputusan administratif dan proses pengambilan keputusan pemerintah ketika datang untuk

memberikan informasi dan membuat keputusan politik. Salah satu alasan Jepang dianggap sebagai salah satu dari sedikit negara maju di dunia adalah administrasi publik dan birokrasi yang dikembangkan dengan baik. Sukses dalam administrasi publik dan birokrasi Jepang terkait erat dengan upaya *Electronic Government (e-government)* negara untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian kualitatif, para penulis memeriksa sejumlah jurnal dan artikel terkait untuk literatur yang relevan. Dengan menggambarkan, mengkategorikan, mengidentifikasi, dan mengatur ulang komponen sub-sub-sub bahasa yang diatur dan sesuai dengan aturan ilmu pengetahuan, tulisan ini menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada jenis tulisan deskriptif.

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau berbicara orang dan perilaku yang dapat diamati dikenal sebagai metodologi kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor di Moleong. (2016). Latar belakang dan individu holistik (utuh) adalah tujuan dari strategi ini, menurut mereka. Menurut Krik dan Miller di Moleong (2016:4), penelitian kualitatif adalah subfield ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan manusia yang disengaja dan tidak direncanakan. Pendekatan analitis "berfokus pada memecahkan masalah saat ini pada masalah nyata dengan mengumpulkan data terstruktur, dijelaskan dan kemudian dianalisis." (Dwiyanto Nurlukman, n.d.). Sebelum menyelam ke dalam analisis, penulis studi ini menelusuri jurnal ilmiah, situs web yang berkaitan dengan dua negara, portal yang relevan, dan sumber daya lain yang dapat mereka temukan yang dapat mendukung temuan penelitian. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak pada kepuasan pengguna, penelitian ini mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut bidang yang relevan. Penelitian yang luas telah menetapkan bahwa kepuasan pengguna adalah tujuan akhir dari implementasi e-government yang dikelola dengan baik. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi adopsi layanan pemerintah elektronik dan, secara ekstensif, tingkat kepuasan yang mungkin dimiliki pengguna dengan layanan ini.

Pendekatan untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data regulasi primer dan sumber data sekunder. "Data primer" mengacu pada informasi yang

dikumpulkan langsung dari sumber. Buku, jurnal, artikel, dan laporan pekerjaan ilmiah (seperti tesis dan disertasi) adalah contoh referensi yang berharga secara akademis; dokumen dari berbagai peraturan legislatif yang relevan, serta sumber tertulis, adalah contoh data pendukung atau sekunder. Tujuan dasar penelitian adalah untuk memperoleh data, sehingga teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam proses penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan e-government di negara Indonesia

Karena e-government Indonesia masih dalam tahap awal, kita tidak dapat menjamin bahwa layanan publik yang disediakan oleh birokrasi telah berjalan lancar dan berfungsi seperti yang dimaksudkan. Platform interaksi seperti forum, email, obrolan, dan survei sudah berada di ujung jari Anda, dan informasi dapat ditemukan di setiap situs pemerintah. Data, bagaimanapun, menunjukkan penggunaan komunikasi eksternal yang tidak efektif. Banyak tantangan yang berlanjut dalam upaya Indonesia untuk menerapkan e-government, yang berkaitan dengan sumber daya manusia, perangkat keras, dan organisasi. Operasi e-government berjalan lancar karena sarana interaksi yang disediakan tidak digunakan dengan baik. Dalam paradigma layanan publik berbasis e-pemerintah, jelas bahwa lebih banyak usaha harus dimasukkan ke dalam perencanaan daripada hanya dalam implementasi aplikasi. (Nawir & Mukhlis, n.d.).

Masalah muncul di bidang infrastruktur dan teknologi karena tidak cukup lembaga pemerintah yang terhubung ke jaringan lokal dan global, dan tidak cukup perangkat lunak atau perangkat keras. Dengan munculnya e-government, lembaga pemerintah harus dapat berkomunikasi satu sama lain lebih efektif. Pemerintah sering mempertanyakan efektivitas e-government karena tantangan organisasi yang dihadapi agen ketika mencoba untuk mengoperasikannya. Struktur organisasi dan peraturan birokrasi yang ketat (SOTK) merupakan penghalang utama untuk pengembangan model layanan publik baru melalui e-government.

Penghalang utama untuk memberikan layanan publik yang luar biasa, menurut dua sudut pandang, adalah standar layanan publik dan birokrasi. Adalah pengetahuan umum pada saat ini bahwa setiap pemerintah di Indonesia memiliki struktur birokrasi yang panjang, tebal, dan rata. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik melalui penyebaran informasi melalui sarana teknologi

adalah salah satu cara untuk mengurangi prevalensi korupsi. Salah satu cara e-government mengubah permainan adalah dengan memberi orang suara yang lebih besar dalam membentuk kebijakan publik dan keputusan. Selain itu, itu tampaknya akan meningkatkan produktivitas, menyederhanakan birokrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, tidak setiap situs web untuk pemerintah setempat menawarkan data yang komprehensif. Tidak semua dari mereka mencakup apa pun di luar profil regional, perbatasan, area yang mungkin, pariwisata, dan topik terkait. Sayangnya, tidak semua platform memberi Anda opsi untuk memasukkan uang ke dalam layanan publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Sebaliknya, mesin pencari adalah komponen yang sangat baik dari banyak situs web regional, terutama yang dimiliki oleh pemerintah regional. Hampir semua situs pemerintah regional Indonesia, dengan pengecualian sejumlah kecil portal e-procurement, membutuhkan akses manual untuk mengakses layanan publik. Terakhir, pelanggaran regional terjadi ketika situs resmi pemerintah tidak membuat informasi keuangan tersedia secara publik. (Utama, 2020). Situs-situs seperti ini, yang disponsori oleh pemerintah Indonesia, memprioritaskan transaksi atas penyediaan konten. Hanya data interaktif atau transaksi yang tersedia secara publik dapat diperoleh secara elektronik melalui situs web ini. Tidak ada alat untuk menangani transaksi yang rumit dan rumit, seperti sistem pembayaran online. Indeks pengungkapan keuangan seringkali lebih rendah dari indeks situs web. Hal ini menyoroti kebutuhan berkelanjutan untuk mendorong dan melaksanakan reformasi yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ketika datang ke dana publik di Indonesia.

Layanan pemerintah yang bergantung pada TI harus dapat diandalkan terlepas dari lokasi atau keterbatasan waktu. Permintaan untuk layanan yang dapat diandalkan seperti ini telah dipenuhi oleh kemajuan dalam teknologi informasi. Tetapi untuk sampai ke sana membutuhkan eksekusi yang efisien dan efektif. Jika pemerintah Indonesia ingin tahu seberapa baik mereka dalam menerapkan e-government, mereka perlu melakukan evaluasi. Langkah berikutnya bagi pemerintah adalah mengevaluasi rating e-government, juga disebut PeGI. Untuk menentukan apakah e-government dapat dilaksanakan secara efektif, kegiatan ini akan dilakukan. Mengikuti kemajuan teknologi yang cepat, operasi PeGI telah berlangsung sejak awal tahun 2007. Selain berfungsi sebagai alat evaluasi untuk

pemerintahan elektronik, tujuan utama PeGI adalah untuk berfungsi sebagai standar untuk penggunaan dan pengembangan TI pemerintah. Harus ada upaya untuk membuat birokrasi lebih baik dalam segala hal: sistem, staf, budaya, dan penggunaan teknologi informasi.

Efisiensi dan produktivitas layanan publik akan menjadi prioritas bagi Indonesia di masa depan karena negara ini berusaha memenuhi kebutuhan warga. Artinya, bantuan diperlukan untuk fasilitas e-pemerintah pusat dan provinsi Indonesia. Ini adalah praktik umum di Indonesia untuk mengatasi birokrasi membersihkan sedikit demi sedikit atau dalam langkah-langkah bertambah, dengan tujuan mencapai perubahan yang diinginkan, antara lain (developing guidelines). Ini bukan piknik untuk melihat pemerintah modern berubah menjadi birokrasi melalui komunikasi dan teknologi informasi.

2) Penerapan e-government di negara Jepang

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingan melalui pengembangan dan implementasi e-government di suatu negara dapat secara drastis mengurangi total biaya yang dihabiskan untuk tujuan administrasi, hubungan, dan interaksi. Biaya ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemerintah atau pemangku kepentingan. Selain itu, (Andita et al., n.d.). Penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (seperti *Wide Area Network*, Internet, dan *Mobile Computing*) yang dapat merevolusi interaksi dengan bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya dikenal sebagai "e-government," menurut *The World Bank Group*.

Sejumlah negara telah menerapkan sistem pemerintahan elektronik sejak 1990-an; Jepang adalah salah satunya. Pada tahun 2001, negara ini mulai membangun infrastruktur e-pemerintah, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi penanganan yang lebih mudah, lebih aman, dan lebih nyaman dari semua hal yang berkaitan dengan pemerintah Jepang.

Pertama dan terpenting di antara prioritas e-government pemerintah Jepang pada tahun 2002 adalah sebagai berikut: 1) infrastruktur Internet yang kuat dan cepat; 2) sistem akademik; 3) sistem komputerisasi untuk pemerintahan; dan 4) pajak elektronik. Jepang terkenal dengan industri telekomunikasi yang berkembang pesat. Dengan demikian, ekspansi internet menjadi prioritas utama pemerintah Jepang. Hal ini dimungkinkan untuk membangun dan menerapkan sistem e-pemerintah menggunakan internet berkecepatan tinggi karena ketersediaan kabel

optik berkelajuan tinggi secara luas di seluruh negara.

Diluncurkan pada tahun 2008 di Kagoshima, "Kizuna" Experimental Satellite adalah satelit komunikasi internet paling canggih di Jepang, dibangun dalam kolaborasi dengan *Japan Space Exploration Agency* (JAXA) dan National Institute of Information and Communications Technology, sebagai bagian dari upaya untuk membangun infrastruktur internet kecepatan tinggi. Satelit ini adalah eksperimen inovatif dan mutakhir dalam membangun jaringan komunikasi Internet nirkabel dengan kemampuan yang luas, khusus untuk wilayah Asia-Pasifik. Jepang dilengkapi dengan baik untuk menerapkan e-Government berkat kapasitas transfer data Kizuna 1,2 gigabit per detik. Pemerintah Jepang mendukung warga negara dengan e-pemerintah layanan konsultasi medis jarak jauh, yang dimungkinkan oleh transfer data super cepat. Layanan ini terkait dengan penggunaan internet kecepatan tinggi. Sebagai bagian dari inisiatif e-government, pemerintah Jepang memodifikasi sistem pendidikannya untuk melayani siswa domestik dan internasional dengan lebih baik.

5. Kesimpulan dan Saran

Di antara banyak negara yang telah mengalami digitalisasi, baik dalam hal pengiriman layanan publik dan pemerintahan, adalah Indonesia dan Jepang. Salah satu negara Asia yang paling progresif, Jepang telah menggunakan e-pemerintah sejak 2001 untuk menyediakan berbagai macam layanan publik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: konsultasi medis, beasiswa, pajak, peta kota, fasilitas kota, dan banyak lagi. Kemajuan ini terjadi dengan cepat dan membuat kemajuan besar.

Masih ada ruang untuk perbaikan dalam kinerja e-government Indonesia, dan itu termasuk upaya dari dalam dan luar negeri. Persepsi publik tentang e-government diperkirakan akan meningkat setelah lulus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan atau tanpa e-government, sistem pengawasan yang dapat diandalkan masih diperlukan, serta keahlian yang mendalam dalam IT dan komitmen terhadap kejujuran dan transparansi dari mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan mematuhi kebijakan.

Manfaat tak terbatas yang dirasakan oleh setiap pengguna yang mengalami dampak dari layanan berbasis elektronik adalah faktor kepuasan. Tidak hanya kualitas layanan elektronik pemerintah memiliki efek pada loyalitas pengguna, tetapi kepuasan warga terhadap layanan ini juga memainkan peran mediator.

Jika sebuah negara serius dalam meningkatkan layanan publiknya, ia harus berinovasi dalam manajemen layanan dan bekerja untuk meningkatkan bar untuk kualitas layanan publik, terutama mengingat tren yang mengesankan menuju implementasi e-pemerintah dan hasil yang dicapai oleh negara-negara maju tertentu. Menurut satu definisi, "e-pemerintah" adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan operasi pemerintah dan memenuhi harapan publik untuk layanan yang lebih baik. Agar pemerintah elektronik efektif, harus ada sistem yang menjamin bahwa sistem operasi dan pengolahan dokumen terintegrasi erat, dengan tujuan menyesuaikan transparansi layanan publik dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Meskipun benar bahwa kedua negara memiliki keanehan mereka sendiri yang dihasilkan oleh kekuatan dan kelemahan mereka yang unik, itu juga benar bahwa e-pemerintah telah berhasil diterapkan di keduanya. Secara luas, kedua negara telah menjadi contoh digitalisasi pemerintah yang sukses.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Dosen Pengampu dan seluruh pihak yang telah membantu, memfasilitasi, memberi masukan, dan mendukung tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Andita, C., Ardelia, F., Junaidi, D. R., Rahman, M. F., & Publik, A. (n.d.). Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Perbandingan Implementasi E-Government Antara Jepang Dan Korea Selatan. *Jurnal Saraq Opat*, 4(2), 2022–2084. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>
- Ayu, K., & Aryanti, F. (n.d.). *The Study of E-Government Implementation in Indonesia*. www.gov.sg,
- Dwiyanto Nurlukman, A. (n.d.). *e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia*.
- Endang, A. (n.d.). *Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat* (Vol. 2, Issue 2).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Nawir, A., & Mukhlis, S. (n.d.). *Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia*.

- <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Ramadhan, D., Furqaan, A., Rayyan, N., Setiawan, I., Ibrahim, A., & Informasi, J. S. (2019). *Positif: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Analisis Pemanfaatan E-Government Sebagai Media Pelayanan Publik Di Indonesia*. 5(1), 16–21.
- Rambe Analis Kebijakan Ahli Pertama, M., & Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, K. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. *JHPIS*, 1(3).
- Surya Budiman, A. (n.d.). *Strategi Penerapan Cloud Computing Untuk Percepatan Implementasi E-Government Wilayah Rural Di Indonesia*.
- Utama, A. . G. S. (2020). The implementation of e-government in indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 190–196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>